

## **DUKUNGAN TURKI KEPADA QATAR DALAM KONFLIK DENGAN NEGARA GCC 2017-2021**

**Adhi Setiadi Nugroho<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

This article analyzes Turkey's strategic support for Qatar during the 2017–2021 Gulf Cooperation Council (GCC) diplomatic crisis, which involved a regional blockade imposed by Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and Egypt. While most regional actors distanced themselves from Qatar, Turkey provided assertive support in the form of military deployments, economic assistance, and diplomatic solidarity. Employing a descriptive qualitative method and a neorealist theoretical framework, this study explores Turkey's motivations and policy choices during the crisis. Findings reveal that Turkey's actions were guided by multifaceted national interests, including geopolitical positioning, ideological alignment with Qatar, defense cooperation, and economic investments. The research argues that Turkey's involvement was not merely an emotional or reactionary response, but a calculated move to enhance its influence in the Middle East and strengthen its role in Islamic geopolitics. Turkey's support enabled Qatar to overcome several strategic disadvantages during the blockade while also improving Ankara's regional reputation. This study contributes to the broader understanding of how middle powers navigate regional tensions through assertive foreign policy. Ultimately, Turkey's approach during the crisis illustrates a shift toward more independent, interest-driven foreign policy behavior that reflects Ankara's evolving role in global security affairs.

**Keywords:** Turkey; Qatar; GCC Crisis; National Interest; Foreign Policy

### **ABSTRAK**

Artikel ini menganalisis dukungan strategis Turki terhadap Qatar selama krisis diplomatik Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) tahun 2017-2021, yang ditandai dengan blokade regional oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir. Ketika sebagian besar negara kawasan mengambil jarak dari Qatar, Turki justru memberikan dukungan yang tegas dalam bentuk pengerahan militer, bantuan ekonomi, dan solidaritas diplomatik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori neorealisme untuk memahami pilihan kebijakan luar negeri Turki selama krisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan Turki didorong oleh kepentingan nasional yang berlapis, termasuk posisi geopolitik, kedekatan ideologis dengan Qatar, kerja sama pertahanan, serta investasi ekonomi. Artikel ini berargumen bahwa sikap Turki bukanlah respons emosional atau reaktif semata, melainkan strategi kalkulatif untuk memperluas pengaruh di Timur Tengah serta memperkuat posisinya dalam geopolitik dunia Islam. Dukungan tersebut membantu Qatar melewati berbagai tekanan strategis, sekaligus meningkatkan reputasi regional Turki. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami bagaimana kekuatan menengah merespons ketegangan kawasan melalui kebijakan luar negeri yang asertif. Sikap Turki dalam krisis ini mencerminkan perubahan menuju pola kebijakan luar negeri yang lebih independen dan berorientasi pada kepentingan, seiring dengan peran Ankara yang semakin menonjol dalam dinamika keamanan global.

**Kata kunci:** Turki; Qatar; Krisis GCC; Kepentingan Nasional; Kebijakan Luar Negeri

## PENDAHULUAN

Krisis diplomatik Teluk tahun 2017 menandai salah satu eskalasi paling signifikan dalam dinamika hubungan antarnegara Timur Tengah pasca Arab Spring. Ketika Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir secara serempak memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memberlakukan blokade ekonomi serta militer, kawasan Teluk berada di ambang fragmentasi geopolitik. Alasan utama pemutusan hubungan tersebut dikaitkan dengan tuduhan bahwa Qatar mendukung kelompok ekstremis dan terlalu dekat dengan Iran, musuh utama koalisi Saudi. Namun, di tengah isolasi tersebut, Turki tampil sebagai negara yang justru memperkuat hubungan bilateralnya dengan Qatar melalui peningkatan kerja sama militer, ekonomi, serta dukungan diplomatik terbuka.

Keputusan Turki untuk mendukung Qatar secara eksplisit merupakan tindakan yang tidak lazim, mengingat Turki memiliki kepentingan hubungan strategis dengan negara-negara anggota GCC lainnya, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dalam logika geopolitik konvensional, suatu negara cenderung mempertahankan netralitas dalam konflik antarnegara kawasan untuk menghindari kerugian diplomatik. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa Turki tidak hanya mengambil posisi, tetapi juga melakukan tindakan konkret berupa pengiriman pasukan dan perluasan pangkalan militer di Qatar. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara realitas empiris (*das sein*) dengan harapan normatif (*das sollen*) bahwa negara akan menjaga keseimbangan politik luar negerinya di kawasan yang sensitif.

Pertanyaan utama yang muncul adalah: apa motif strategis Turki dalam mendukung Qatar? Apakah langkah tersebut semata-mata merupakan wujud solidaritas antara sesama negara Islam, atau terdapat kalkulasi politik luar negeri yang lebih dalam dan terstruktur? Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa sikap Turki bukanlah respons spontan terhadap krisis, melainkan strategi jangka panjang untuk memperluas pengaruh regional dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan menengah (*middle power*) yang mandiri di Timur Tengah.

Berbagai studi sebelumnya telah membahas krisis GCC dan peran negara-negara kunci seperti Arab Saudi, Iran, maupun Amerika Serikat (Ulrichsen, 2018; Roberts, 2019; Albasoos et al., 2021). Namun, keterlibatan Turki sering kali hanya dibahas secara sekilas sebagai pendukung Qatar, tanpa eksplorasi mendalam terhadap dimensi strategis dan motif kebijakan luar negerinya. Padahal, keterlibatan Turki dalam krisis ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral dengan Qatar, tetapi juga memengaruhi konstelasi kekuatan dan aliansi politik di kawasan. Kekosongan inilah yang ingin diisi oleh artikel ini, dengan menelaah kebijakan luar negeri Turki melalui lensa teori neorealisme dan konsep kepentingan nasional.

Kebaruan dari artikel ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis empirik atas tindakan diplomatik dan militer Turki dengan kerangka teoretis yang menekankan pada rasionalitas aktor negara. Kontribusi akademiknya berada pada upaya untuk memahami bagaimana aktor negara seperti Turki mengartikulasikan kepentingan nasionalnya melalui respons terhadap krisis regional. Dalam hal ini, Turki tidak hanya bertindak sebagai sekutu

ideologis Qatar, tetapi juga sebagai aktor rasional yang sedang membentuk ulang posisinya dalam struktur kekuasaan regional.

Argumen utama yang diajukan dalam artikel ini adalah bahwa dukungan Turki terhadap Qatar merupakan refleksi dari transformasi strategi luar negeri Ankara yang semakin independen, berorientasi pada kepentingan nasional, dan berambisi menyeimbangkan dominasi tradisional Arab Saudi di kawasan. Dengan kata lain, keterlibatan Turki bukanlah anomali kebijakan luar negeri, melainkan ekspresi dari agenda geopolitik yang lebih luas.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis bentuk dan dimensi dukungan strategis Turki terhadap Qatar selama krisis GCC 2017–2021 serta menelaah motivasi kebijakan luar negeri Turki berdasarkan teori neorealisme. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam studi kebijakan luar negeri, geopolitik kawasan, serta peran kekuatan menengah dalam merespons krisis internasional.

## **KERANGKA ANALITIK**

Untuk menganalisis kebijakan luar negeri Turki dalam mendukung Qatar selama krisis GCC 2017-2021, artikel ini menggunakan pendekatan neorealisme sebagai kerangka analitik utama. Neorealisme atau realisme struktural, sebagaimana dikembangkan oleh Kenneth Waltz, menekankan bahwa struktur sistem internasional—khususnya anarki dan distribusi kapabilitas antarnegara—menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku negara. Dalam konteks ini, negara diposisikan sebagai aktor rasional yang bertindak demi mempertahankan dan memperluas kepentingan nasionalnya di bawah tekanan sistem internasional yang kompetitif dan tidak terpusat.

Neorealisme dalam artikel ini digunakan untuk menafsirkan tindakan Turki sebagai bagian dari strategi adaptif terhadap perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan Teluk. Dukungan militer, ekonomi, dan diplomatik terhadap Qatar bukan sekadar tindakan moral atau solidaritas keagamaan, melainkan kalkulasi strategis untuk memanfaatkan peluang geopolitik yang muncul akibat isolasi Qatar oleh blok Saudi. Dengan memperkuat aliansinya bersama Qatar, Turki menegaskan posisinya sebagai kekuatan menengah yang independen dan mampu mengimbangi dominasi regional Arab Saudi.

Dalam konteks ini, konsep "middle power" menjadi relevan, yaitu negara yang meskipun tidak dominan secara global, tetapi memiliki kapasitas dan ambisi untuk memengaruhi kawasan melalui diplomasi aktif, kerja sama pertahanan, dan kebijakan luar negeri yang adaptif. Turki sebagai middle power bertindak bukan hanya berdasarkan kepentingan praktis, tetapi juga memperhitungkan posisi strategis jangka panjang di kawasan.

Kerangka ini juga mempertimbangkan aspek kepentingan nasional secara multidimensional: mulai dari pertimbangan keamanan (penguatan pangkalan militer di Qatar), ekonomi (investasi dan kerja sama energi), hingga ideologis (kesamaan pandangan terhadap politik Islam moderat). Dengan menggunakan neorealisme, artikel ini menyusun analisis yang

menyoroti keterkaitan antara struktur sistem internasional dan keputusan politik luar negeri Turki, serta menjelaskan bagaimana aktor negara merespons krisis kawasan dengan strategi berbasis rasionalitas dan kekuatan.

Namun, pendekatan neorealisme juga memiliki keterbatasan. Fokus utamanya pada struktur dan rasionalitas negara seringkali mengabaikan peran aktor domestik, faktor identitas nasional, dan dinamika politik internal yang juga memengaruhi kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, artikel ini menyadari bahwa meskipun neorealisme memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Turki, ia tidak sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas variabel ideologis atau subjektif yang mungkin turut memengaruhi keputusan Ankara selama krisis.

Dengan demikian, pendekatan neorealisme memberikan pijakan konseptual yang kokoh dalam memahami orientasi strategis Turki yang bertumpu pada kalkulasi kepentingan jangka panjang dalam sistem internasional yang tidak terpusat. Meski begitu, keterbukaan terhadap pendekatan pelengkap tetap diperlukan dalam pembacaan lebih utuh terhadap dinamika kebijakan luar negeri aktor seperti Turki.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam motif, strategi, dan bentuk dukungan yang diberikan oleh Turki kepada Qatar selama krisis GCC tahun 2017–2021. Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam memahami konteks kompleks yang melibatkan aktor negara, dinamika regional, serta interaksi antar kepentingan dalam sistem internasional yang tidak linier. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri hubungan sebab akibat yang tidak selalu terlihat secara langsung, serta menginterpretasikan makna di balik tindakan politik luar negeri yang bersifat strategis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga riset, buku akademik, laporan kebijakan luar negeri, media kredibel internasional, serta pernyataan resmi pemerintah Turki dan Qatar. Sumber-sumber ini tidak hanya memberikan informasi faktual, tetapi juga membuka ruang interpretasi terhadap narasi yang dibangun oleh masing-masing aktor terkait konflik. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yakni dengan mengidentifikasi dan menganalisis dokumen yang relevan secara sistematis berdasarkan topik dan fokus penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) yang dikombinasikan dengan pendekatan tematik. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk menelusuri motif, pola, dan makna tertentu dalam dokumen, pidato, dan publikasi resmi, yang kemudian dikategorisasi berdasarkan kerangka konseptual neorealisme dan kepentingan nasional. Pendekatan tematik digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang berulang

dalam data, seperti dimensi keamanan, ekonomi, dan ideologis yang membentuk orientasi kebijakan luar negeri Turki.

Dalam upaya menjaga validitas dan kredibilitas data, dilakukan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh. Validitas juga diperkuat dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori yang digunakan, sehingga analisis yang disusun tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dengan metode ini, penelitian berusaha menjelaskan secara komprehensif bagaimana Turki merumuskan kebijakan luar negeri terhadap Qatar dengan mempertimbangkan kepentingan nasionalnya di tengah krisis kawasan. Metode ini juga memungkinkan penulis untuk mengungkap rasionalitas strategi Turki dalam menghadapi tekanan regional, sekaligus memperluas kontribusi pemahaman teoretis terhadap dinamika kebijakan luar negeri negara-negara middle power di kawasan konflik seperti Timur Tengah.

## **PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Krisis GCC 2017–2021 dan Dampaknya terhadap Stabilitas Kawasan**

Krisis Teluk 2017 menjadi salah satu titik balik dalam dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah, ketika Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir secara kolektif memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Mereka menuduh Qatar mendukung ekstremisme, membina hubungan terlalu dekat dengan Iran, dan melakukan intervensi politik melalui media seperti Al Jazeera. Blokade tersebut bukan hanya mencakup pemutusan hubungan diplomatik, tetapi juga mencakup penutupan perbatasan darat, laut, dan udara, sehingga mengisolasi Qatar secara menyeluruh dari akses kawasan.

Situasi ini memunculkan gejolak yang signifikan terhadap stabilitas regional. Qatar, yang sebelumnya menjadi anggota kooperatif Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), tiba-tiba ditempatkan sebagai pihak antagonis dalam kerangka kerja sama tersebut. Ketegangan politik tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral antarnegara Teluk, tetapi juga membuka celah intervensi aktor eksternal yang melihat krisis ini sebagai peluang untuk meningkatkan pengaruh geopolitik mereka. Dalam konteks inilah, Turki muncul sebagai salah satu aktor yang mengambil posisi aktif dengan memberikan dukungan penuh kepada Qatar.

Krisis ini memperlihatkan transformasi struktur keamanan kawasan Teluk dari sistem yang relatif kooperatif menjadi sistem yang terfragmentasi dan penuh kecurigaan. Ketidakmampuan GCC untuk menyelesaikan konflik internal secara damai juga menunjukkan adanya keterbatasan institusional dalam mengelola konflik intra-regional. Ketegangan ini semakin diperparah oleh perbedaan posisi ideologis, khususnya terkait peran Islam politik dan sikap terhadap Iran, yang memperdalam jurang pemisah antara Qatar dan blok Saudi.

Dampak dari krisis ini bersifat multidimensional. Secara ekonomi, Qatar mengalami gangguan logistik dan perdagangan, terutama karena ketergantungan pada jalur darat melalui Arab Saudi. Namun, isolasi tersebut juga mendorong Qatar untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan memperkuat swasembada nasional. Secara sosial-politik, krisis ini menguji daya tahan identitas nasional Qatar dan memperkuat solidaritas domestik di tengah tekanan eksternal. Dari sisi geopolitik, krisis ini membuka jalan bagi reorientasi aliansi strategis di kawasan, di mana peran Turki menjadi sangat signifikan.

Keterlibatan Turki dalam krisis ini tidak bisa dilepaskan dari perhitungan strategis jangka panjang. Aliansi dengan Qatar memberikan peluang bagi Turki untuk memperkuat pijakan militernya di kawasan Teluk melalui penempatan pasukan di pangkalan militer Al-Udeid dan peningkatan kerja sama pertahanan. Selain itu, Turki melihat krisis ini sebagai kesempatan untuk memproyeksikan citra sebagai kekuatan regional yang mampu menyeimbangkan dominasi Arab Saudi dan mendorong agenda politik luar negeri yang lebih independen. Dalam konteks sistem internasional yang anarkis dan kompetitif sebagaimana dijelaskan dalam kerangka neorealisme, krisis ini menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh Turki untuk memperkuat posisi strategisnya di Timur Tengah.

Berbeda dari negara seperti Kuwait yang mengadopsi pendekatan mediasi selama krisis, Turki secara eksplisit menempuh strategi konfrontatif melalui penguatan aliansi bilateral dengan Qatar. Pilihan ini mencerminkan gaya diplomasi middle power yang lebih agresif dan mempertegas kecenderungan Turki untuk bertindak sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Waltz (1979), dalam sistem internasional yang anarkis, negara-negara akan bertindak untuk mempertahankan atau memperbesar kapabilitasnya sebagai respons terhadap tekanan struktural. Tindakan Turki dapat dibaca sebagai manifestasi dari logika pertahanan diri negara yang mengantisipasi pergeseran kekuatan kawasan yang terlalu terkonsentrasi pada blok Saudi. Dalam kerangka ini, aliansi dengan Qatar memberikan leverage strategis untuk memperkuat posisi tawar Turki di Timur Tengah.

Sebagai tambahan, data dari Turkish Statistical Institute menunjukkan bahwa nilai ekspor Turki ke Qatar meningkat dari USD 433 juta pada 2016 menjadi lebih dari USD 1 miliar pada 2019, mengindikasikan adanya penguatan hubungan ekonomi paralel dengan dinamika politik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Turki tidak hanya dipandu oleh pertimbangan ideologis, tetapi juga kalkulasi keuntungan ekonomi jangka menengah dan panjang.

Dengan demikian, krisis GCC 2017-2021 bukan sekadar konflik antarnegara Teluk, melainkan menjadi arena persaingan kekuatan regional dan proyeksi kepentingan nasional masing-masing aktor. Respon Turki terhadap krisis ini merepresentasikan kalkulasi rasional berdasarkan struktur sistem internasional yang sedang mengalami reorientasi, di mana peluang untuk memperkuat pengaruh menjadi dasar tindakan kebijakan luar negeri Ankara. Artikel ini juga menawarkan kontribusi akademik baru dengan menekankan bahwa pendekatan neorealisme dapat secara efektif menjelaskan perilaku aktor middle power dalam dinamika

regional kontemporer, khususnya dalam konteks krisis intra-kawasan seperti yang terjadi di Teluk.

### **Bentuk Dukungan Strategis Turki terhadap Qatar: Militer, Ekonomi, dan Diplomasi**

Bentuk dukungan yang diberikan oleh Turki kepada Qatar selama krisis GCC mencerminkan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek militer, ekonomi, dan diplomasi. Dimensi militer tampak paling nyata melalui pengiriman pasukan tambahan ke pangkalan militer Turki di Qatar pada tahun 2017, yang merupakan bentuk konkret dari komitmen keamanan bilateral. Pangkalan ini, yang awalnya dibangun sebagai bagian dari kerja sama strategis kedua negara, menjadi simbol nyata solidaritas Turki terhadap Qatar dan menciptakan efek deterrence terhadap kemungkinan agresi dari blok Saudi.

Turki dan Qatar menandatangani beberapa nota kesepahaman yang memperluas kerja sama pertahanan, termasuk pelatihan militer bersama dan peningkatan interoperabilitas antara angkatan bersenjata kedua negara. Kehadiran militer Turki tidak hanya menguntungkan Qatar dari sisi keamanan, tetapi juga memperkuat posisi Turki sebagai aktor regional yang memiliki pengaruh langsung di jantung kawasan Teluk.

Dari sisi ekonomi, Turki segera merespons blokade dengan meningkatkan ekspor barang kebutuhan pokok ke Qatar, termasuk makanan, air, dan material konstruksi. Jalur udara dan laut antara kedua negara dioptimalkan untuk memastikan suplai logistik tetap berjalan. Data dari Turkish Exporters Assembly mencatat lonjakan ekspor Turki ke Qatar hingga dua kali lipat dalam periode awal krisis. Langkah ini tidak hanya menyelamatkan Qatar dari krisis pangan, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi bilateral yang sebelumnya tidak terlalu dominan.

Turki juga mendorong investasi langsung di Qatar, khususnya pada sektor konstruksi, teknologi, dan perbankan. Perusahaan-perusahaan Turki mendapatkan sejumlah kontrak pembangunan infrastruktur, termasuk yang berkaitan dengan persiapan Piala Dunia 2022. Melalui jalur ini, Turki memperluas pengaruh ekonominya di Qatar dan menciptakan ketergantungan struktural yang saling menguntungkan.

Dalam bidang diplomasi, Turki memainkan peran aktif di berbagai forum internasional untuk membela posisi Qatar. Presiden Recep Tayyip Erdoğan secara terbuka mengkritik tindakan blokade dan menyerukan penyelesaian damai melalui dialog. Turki juga memperkuat koordinasi diplomatik dengan Iran dan Rusia sebagai bagian dari strategi regionalnya, tanpa secara langsung menghadapi Amerika Serikat, yang pada saat itu memiliki posisi ambigu terhadap krisis Teluk.

Pendekatan diplomatik Turki mencerminkan upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara nilai solidaritas dan realpolitik. Turki menghindari eskalasi terbuka dengan negara-negara blok Saudi, tetapi tetap konsisten dalam mendukung Qatar sebagai mitra strategis. Strategi ini menunjukkan kemampuan Turki untuk memanfaatkan peluang krisis

dalam rangka memperluas jejaring diplomasi, memperkuat kredibilitas internasional, dan meningkatkan daya tawar di panggung Timur Tengah.

Dengan demikian, bentuk dukungan strategis Turki terhadap Qatar tidak bersifat satu dimensi, melainkan mencerminkan sinergi antara instrumen kekuatan militer, ekonomi, dan diplomatik. Pendekatan ini juga menunjukkan kecenderungan Turki untuk memadukan hard power dan soft power dalam kebijakan luar negerinya, sebagaimana didefinisikan dalam teori middle power diplomacy.

Dari sudut pandang teoretis, tindakan Turki dalam mendukung Qatar mencerminkan prinsip-prinsip realisme ofensif, di mana negara memperluas pengaruhnya bukan semata-mata karena kebutuhan pertahanan, tetapi sebagai strategi preventif untuk meminimalisasi ancaman dari kekuatan regional dominan. Ketergantungan Qatar terhadap dukungan Turki juga menimbulkan dinamika baru dalam hubungan bilateral, yang berpotensi menyeimbangkan, sekaligus memunculkan risiko asimetri dalam jangka panjang.

Selain itu, dibandingkan dengan pendekatan yang lebih netral seperti yang diambil oleh Oman atau Pakistan selama krisis, Turki memilih jalur konfrontatif-aktif. Hal ini menunjukkan bahwa Ankara memiliki perhitungan strategis tersendiri dalam memanfaatkan krisis sebagai momen reposisi kekuatan. Maka dari itu, strategi ini patut dibaca tidak hanya sebagai respons terhadap keadaan, tetapi sebagai ekspresi dari visi jangka panjang Turki dalam struktur kekuasaan Timur Tengah. Kombinasi ketiga aspek ini menunjukkan adanya desain kebijakan luar negeri yang holistik dan terstruktur, yang diarahkan untuk memperkuat posisi Turki sebagai middle power dengan pengaruh yang signifikan di kawasan Teluk.

### **Dinamisasi Pasang Surut Hubungan Turki dan Qatar Pasca-Krisis**

Setelah krisis GCC mereda dengan penandatanganan Deklarasi Al-Ula pada Januari 2021, hubungan Turki dan Qatar tidak mengalami pelemahan, melainkan justru menunjukkan konsistensi dan penguatan dalam berbagai sektor. Meskipun blokade resmi telah dicabut dan Qatar mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, kemitraan strategis antara Doha dan Ankara tetap dipertahankan, bahkan diekspansi. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kedua negara telah melampaui dinamika reaktif terhadap krisis dan masuk ke tahap institusionalisasi aliansi bilateral.

Dalam bidang pertahanan, keberadaan pasukan Turki di Qatar tetap dipertahankan, bahkan diperluas secara kapasitas dan fungsionalitas. Latihan militer bersama yang lebih intensif serta kerja sama intelijen menjadi indikator bahwa dimensi keamanan dalam hubungan kedua negara tidak lagi bersifat temporer, melainkan telah menjadi bagian dari doktrin keamanan bersama. Hal ini mencerminkan model kemitraan strategis jangka panjang yang memperhitungkan kebutuhan geopolitik dan ancaman kawasan secara lebih luas.

Dari sisi ekonomi, investasi bilateral terus menunjukkan tren positif. Proyek infrastruktur besar seperti pelabuhan, jalur metro, dan fasilitas Piala Dunia 2022 banyak melibatkan perusahaan-perusahaan Turki, yang menandakan kepercayaan Qatar terhadap

kualitas dan efisiensi mitra bisnis dari Ankara. Di samping itu, ekspansi Qatar Investment Authority ke sektor-sektor vital di Turki, termasuk perbankan dan properti, menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi kedua negara bersifat resiprokal, bukan satu arah.

Dalam ranah diplomasi, Turki dan Qatar semakin sering menampilkan sinergi dalam isu-isu regional seperti Palestina, Suriah, dan Afghanistan. Mereka mengadopsi posisi yang sejalan dalam berbagai forum internasional, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sikap yang koheren dalam diplomasi regional memperlihatkan adanya kesamaan visi strategis yang tidak hanya terbatas pada isu bilateral, tetapi juga dalam konfigurasi geopolitik kawasan yang lebih luas.

Namun, dinamika pasang surut juga tampak dari tantangan yang dihadapi kedua negara dalam mempertahankan relevansi aliansi mereka. Di satu sisi, membaiknya hubungan Qatar dengan negara-negara GCC lainnya dapat mengurangi ketergantungan strategis terhadap Turki. Di sisi lain, perubahan dalam lanskap politik domestik Turki dan Qatar, serta fluktuasi ekonomi global, dapat memengaruhi stabilitas hubungan ini. Meski demikian, hingga saat ini, tidak ada indikasi bahwa kedua negara akan meninggalkan kemitraan strategis mereka.

Dengan demikian, fase pasca-krisis tidak mengurangi intensitas kerja sama Turki-Qatar, melainkan memperlihatkan proses konsolidasi yang menunjukkan kedewasaan hubungan bilateral. Meskipun demikian, karakter institusionalisasi aliansi ini masih dapat dipertanyakan apabila dibandingkan dengan bentuk aliansi formal seperti NATO atau SCO yang memiliki mekanisme kolektif yang terstruktur. Dalam kerangka liberalisme institusional, hubungan Turki-Qatar dapat dikategorikan sebagai bentuk kooperasi pragmatis yang belum tentu memiliki daya tahan terhadap tekanan sistemik jangka panjang.

Lebih jauh, neorealisme juga menggarisbawahi bahwa ketergantungan strategis yang terlalu besar terhadap satu aktor negara dapat menimbulkan asimetri kekuasaan, di mana otonomi kebijakan pihak yang lebih lemah menjadi terbatas. Oleh sebab itu, dinamika relasi Turki-Qatar perlu terus diamati untuk mengidentifikasi apakah relasi ini mengarah pada simbiosis mutualisme atau justru ke arah dominasi terselubung dari satu pihak. Dinamika ini menggambarkan bahwa aliansi yang semula dibentuk sebagai respons terhadap tekanan eksternal kini telah berevolusi menjadi kemitraan jangka panjang yang bersifat strategis, multidimensi, dan relatif tahan terhadap perubahan lingkungan politik regional.

### **Evaluasi Akhir Strategi Diplomasi Pertahanan Turki terhadap Qatar**

Setelah menelusuri dinamika geopolitik yang melatarbelakangi krisis GCC dan respons Turki dalam mendukung Qatar, dapat disimpulkan bahwa strategi diplomasi pertahanan yang diterapkan oleh Ankara merupakan bentuk artikulasi kepentingan nasional yang menggabungkan instrumen kekuatan keras dan lunak secara sinergis. Strategi ini tidak hanya menempatkan Turki sebagai pelindung regional bagi Qatar, tetapi juga sebagai aktor dengan agenda perluasan pengaruh di kawasan Teluk yang selama ini didominasi oleh Arab Saudi dan sekutunya.

Analisis atas dimensi militer, ekonomi, dan diplomatik menunjukkan bahwa pendekatan Turki bersifat komprehensif dan jangka panjang, tidak semata didorong oleh solidaritas ideologis atau kepentingan sesaat. Keberadaan pangkalan militer di Qatar, peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi, serta keselarasan posisi diplomatik di forum internasional menunjukkan bahwa Turki berupaya menciptakan ekosistem aliansi strategis yang relatif tahan terhadap fluktuasi politik regional. Ini menunjukkan kematangan dalam strategi kebijakan luar negeri Turki, yang memperhitungkan struktur kekuasaan regional sekaligus celah strategis untuk memperkuat posisinya.

Namun demikian, strategi ini tidak tanpa risiko. Ketergantungan Qatar terhadap dukungan militer Turki bisa menciptakan asimetri dalam hubungan bilateral, sementara Turki sendiri bisa mengalami tekanan jika terjadi perubahan signifikan dalam tatanan geopolitik atau tekanan dari kekuatan besar lain. Dalam konteks ini, pendekatan neorealis tetap relevan dalam menjelaskan motif dan kalkulasi rasional kedua negara dalam mempertahankan kemitraan mereka.

Akhirnya, strategi diplomasi pertahanan Turki terhadap Qatar dapat dilihat sebagai manifestasi dari kebijakan luar negeri yang berbasis kalkulasi realistis, namun tetap terbuka terhadap pendekatan kooperatif dan pragmatis. Ini mencerminkan transformasi identitas politik luar negeri Turki di era pasca-Arab Spring: dari negara perifer menjadi aktor regional yang semakin percaya diri dalam membentuk konstelasi kekuasaan di kawasan Timur Tengah.

## **KESIMPULAN**

Strategi diplomasi pertahanan Turki terhadap Qatar dalam konteks krisis GCC 2017 hingga pasca-krisis menunjukkan manifestasi kebijakan luar negeri berbasis kalkulasi realistis, namun terbuka terhadap pendekatan kooperatif. Dukungan Ankara tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menunjukkan konsistensi dalam dimensi militer, ekonomi, dan diplomatik yang mengarah pada institusionalisasi aliansi bilateral.

Krisis dimanfaatkan oleh Turki untuk memperluas pengaruhnya sebagai middle power di kawasan Teluk yang selama ini didominasi oleh kekuatan konservatif seperti Arab Saudi dan UEA. Keberadaan pangkalan militer di Qatar, ekspansi investasi dua arah, serta penyelarasan diplomasi regional memperlihatkan upaya sistematis Ankara membangun ekosistem kemitraan strategis jangka panjang.

Namun demikian, potensi ketimpangan struktural dalam hubungan bilateral, ketergantungan keamanan Qatar terhadap Turki, serta dinamika politik domestik masing-masing negara dapat memengaruhi stabilitas aliansi ke depan. Relasi ini, meskipun tampak solid, belum sepenuhnya teruji oleh tekanan sistemik kawasan atau rivalitas blok besar lainnya.

Secara akademik, studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang strategi aktor middle power dalam membentuk arsitektur keamanan kawasan melalui diplomasi pertahanan. Untuk penelitian mendatang, perlu ditelaah lebih lanjut sejauh mana respons

adaptif negara-negara GCC lain terhadap konsolidasi aliansi ini akan mempengaruhi keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah pasca-Arab Spring.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Aguilar, A. G. (2008). Peri-urbanization, illegal settlements and environmental impact in Mexico City. *Cities*, 25(3), 133–145. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2008.02.003>

Altunisik, M. B. (2014). The new Turkish foreign policy and the future of Turkey's Middle Eastern politics. *UNISCI Discussion Papers*, (32), 121–135.

Barzegar, K. (2019). Regional security and the role of middle powers: The case of Iran and Turkey. *Middle East Policy*, 26(2), 52–66. <https://doi.org/10.1111/mepo.12418>

Kardaş, Ş. (2012). Turkey: A regional security actor in the making. *International Journal*, 67(1), 117–133. <https://doi.org/10.1177/002070201206700108>

Roberts, D. B. (2017). Qatar and the UAE: Exploring divergent responses to the Arab Spring. *Middle East Journal*, 71(4), 544–562. <https://doi.org/10.3751/71.4.13>

Yayla, S. (2022). Strategic partnership between Turkey and Qatar: An example of alliance formation in international relations. *Turkish Journal of Middle Eastern Studies*, 9(1), 45–68.

### Buku dan Disertasi

Hinnebusch, R. (2003). *The International Politics of the Middle East*. Manchester: Manchester University Press.

Neuman, W. L. (2007). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (6th ed.). Boston: Pearson Education.

Ulrichsen, K. C. (2017). *The Gulf States in International Political Economy*. London: Palgrave Macmillan.

Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Nur, T. (2008). *Verba dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia: Studi gramatika konstrastif* (Unpublished Dissertation). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.